

**ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA**

Julianto Hutasuhut, Marisa Husaini, Putri Dwi Anjani, Ridho Mukti, Vitri Dea Rizki  
Fakultas Ekonomi, Universitas Muslim Nusantara Alwashliyah Medan, Medan, Indonesia  
[julianto@umnaw.ac.id](mailto:julianto@umnaw.ac.id)

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Diterima: 3 November 2021 Direvisi: 15 November 2021 Disetujui: 18 November 2021  Kata Kunci: Pertumbuhan Ekonomi, IPM, Deli Serdang	Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia merupakan dua variabel yang saling berhubungan karena IPM memiliki 3 indikator yang salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi yang dapat dihitung dengan PDB atau PDRB. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi dengan Indeks Pembangunan Manusia dengan menggunakan data sekunder dari BPS Sumatera Utara. Berdasarkan data dari BPS untuk periode tahun 2015-2020 diketahui bahwa terdapat faktor hubungan yang erat antara pertumbuhan ekonomi dengan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. Hasil analisis juga menjelaskan, pertumbuhan ekonomi dapat saja berpengaruh kecil terhadap IPM namun karena faktor lain seperti pendidikan dan kesehatan berkembang lebih cepat dari pertumbuhan ekonomi nilai Indeks Pembangunan Manusia tetap meningkat. Hal ini seperti yang terjadi pada tahun 2020 nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang rendah (-1,78) ditahun 2020 namun nilai IPM justru mengalami peningkatan dari 75,43 di tahun 2019 menjadi 75,44 di tahun 2020. Atau lebih tinggi dari IPM Rata-Rata Deli Serdang (74,33).

**PENDAHULUAN**

Salah satu tujuan pembangunan nasional yang termaktub di dalam pembukaan UUD 1945 adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Berbagai ukuran yang digunakan berbagai negara untuk mengukur peningkatan kesejahteraan misalnya adalah berdasarkan besarnya tingkat pendapatan, rendahnya disparitas yang kaya dan miskin, masa istirahat yang cukup dan faktor non ekonomis lainnya. Namun dari sekian banyak konsep yang ada, para ahli cenderung memilih salah satu diantaranya yang disebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM) karena dipandang cukup representatif sebagai indikator pengukuran tingkat kesejahteraan. Alasan lainnya adalah karena IPM memuat 3 (tiga) komponen yang cukup relevan untuk pengukuran kesejahteraan tersebut yang terdiri dari aspek pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

Pembangunan adalah proses yang dilakukan oleh banyak negara dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat (Todaro & Smith, 2015). Orientasi pembangunan di negara sedang berkembang mengalami beberapa perubahan. Pada awal proses pembangunan, kebanyakan negara sedang berkembang mengarahkannya untuk tujuan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat dimengerti. Sebagai negara yang baru

merdeka, pembangunan adalah strategi sarana untuk meningkatkan output perekonomian. Seiring berkembangnya perekonomian, proses pembangunan diarahkan kepada tujuan pembangunan manusia dan penanggulangan kemiskinan. Perubahan orientasi ini adalah sebagai jawaban atas munculnya masalah kesenjangan dan kemiskinan yang diakibatkan dari strategi pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan output dan tanpa memperhatikan distribusi pendapatan serta keadilan di antar para pelaku ekonomi (Alhumami, 2016). Atas dasar tujuan pembangunan tersebut, pemerintah selalu berupaya agar target pertumbuhan ekonomi serta pengentasan kemiskinan dapat berjalan bersama. Negara memiliki peran penting untuk mewujudkan keduanya. Peran negara akan sangat dibutuhkan untuk mengatur kegiatan ekonomi agar terjaga kestabilan ekonomi dan dapat menyejahterakan rakyat. Melalui peran ini negara menjaga rakyat agar rakyat tidak mengalami kemiskinan dan pengangguran (Isnaini, 2017). Upaya menyejahterakan rakyat dan mengurangi kemiskinan dilakukan dengan mencurahkan seluruh sumber daya yang dimiliki agar hasilnya dapat dirasakan secara optimal dan merata oleh seluruh rakyat (Fuadi, 2015).

Salah satu upaya mewujudkan kondisi ekonomi dan tujuan pembangunan yang diinginkan adalah melalui kebijakan fiskal. Dalam konteks makro kebijakan fiskal diartikan sebagai kebijakan yang terkait dengan perpajakan dan anggaran pemerintah (Case, Fair, & Oster, 2017). Di Indonesia, kebijakan fiskal tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tingkat nasional (pusat) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tingkat daerah provinsi serta kabupaten dan kota. Melalui APBN atau APBD pemerintah akan mengupayakan pendapatan dan mengatur alokasi belanja agar berdampak positif terhadap pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan rakyat serta mengurangi kemiskinan. Hal ini penting digarisbawahi sebab dalam proses perencanaan pembangunan.

Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan output perkapita dalam jangka panjang. Dalam praktek, pertumbuhan ekonomi mengukur seberapa besar PDB (riil) perkapita tumbuh dari waktu ke waktu (Acemoglu, Laibson, & List, 2019). Pertumbuhan ekonomi dapat dipahami sebagai suatu penjelasan tentang faktor-faktor apa saja yang menentukan kenaikan produk perkapita suatu wilayah dalam jangka panjang, dan penjelasan mengenai bagaimana sampai terjadi proses pertumbuhan ekonomi. Sedangkan produk perkapita adalah produk total dibagi dengan jumlah penduduk dalam suatu wilayah. Menurut (Barika, 2015) mengemukakan terdapat enam ciri khas proses pertumbuhan ekonomi yang dapat ditemukan di hampir semua negara yang sekarang maju, antara lain: (1) tingkat pertumbuhan PDRB per kapita dan pertumbuhan penduduk yang tinggi; (2) tingkat kenaikan total produktivitas faktor produksi yang tinggi; (3) tingkat transformasi structural ekonomi yang tinggi; (4) tingkat transformasi sosial dan ideologi yang tinggi; (5) adanya kecenderungan negara-negara yang mulai atau yang sudah maju perekonomiannya untuk berusaha merambah bagian-bagian lain sebagai daerah pemasaran dan sumber bahan baku yang baru; dan (6) adanya keterbatasan penyebaran pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai sekitar sepertiga bagian penduduk dunia. Kemudian Tambunan (2014:40) menegaskan, dalam pemahaman ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi adalah penambahan PDB, yang berarti peningkatan PN (pendapatan nasional). Untuk meningkatkan PN, pertumbuhan

ekonomi (PDB) menjadi salah satu target penting yang harus dicapai dalam pembangunan ekonomi.

Berdasarkan model pertumbuhan ekonomi Solow-Swan dapat dinyatakan bahwa pertumbuhan penduduk, akumulasi kapital, kemajuan teknologi dan output saling berinteraksi dalam proses pertumbuhan ekonomi (Pratama, 2014). PDRB per kapita di suatu daerah mencerminkan rata-rata kemampuan pendapatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya terutama kebutuhan-kebutuhan pokok. Pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat merupakan salah satu indikasi kesejahteraan yang berasal dari aspek pemerataan pendapatan masyarakat di daerah. Tingkat kemiskinan tidak hanya berhubungan dengan aspek kemampuan pendapatan, akan tetapi juga berkenaan dengan pemerataan pendapatan masyarakat di suatu daerah (Cholili and Hardjo, 2014).

Secara konsep, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang dihitung dari tiga aspek dasar yaitu umur panjang dan sehat yang diwakili oleh indikator angka harapan hidup saat lahir (Ilhami, 2014). Selanjutnya keberhasilan pembangunan pendidikan dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk menikmati pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi menjadi parameter berikutnya guna mempersiapkan masyarakat meraih kehidupan yang lebih baik. Komponen berikutnya adalah bidang ekonomi yang diwakili oleh pengeluaran masyarakat pemerintah dan pihak swasta. Untuk hal ini satuan yang digunakan adalah Produk Nasional Bruto (BPS: 2019a). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat ketimpangan pertumbuhan IPM di Sumatera Utara Mengingat Sumatera Utara terdiri dari 33 Kabupaten/Kota yang berbeda kekuatan infra struktur Pendidikan, Fasilitas Kesehatan dan besarnya Pengeluaran atau Produk Nasional Bruto. Disamping itu penelitian ini juga untuk bertujuan mencari langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam mengurangi ketimpangan pertumbuhan ekonomi dan IPM di Kabupataen Deli Serdang Sumatera Utara.

Indeks pembangunan manusia adalah ukuran pencapaian suatu pembangunan manusia yang berbasis pada sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Perhitungan IPM sebagai indikator pembangunan manusia mempunyai tujuan yang sangat penting, yakni: membangun indikator yang mengukur dimensi dasar pembangunan manusia dan perluasan kebebasan memilih. Teori *Human capital* berpendapat bahwa pendidikan adalah sumber investasi sumber daya manusia yang akhirnya memberikan banyak manfaat, seperti: mampu memperoleh lapangan kerja yang lebih baik, mampu bekerja efektif dan efisien, serta meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan individu tersebut (Latifah, Rotinsulu and Tumilaar, 2017). Pendapat lain Indeks pembangunan manusia adalah pengukuran, perbandingan dari angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, dan standar hidup, hal ini berlaku untuk semua Negara di seluruh dunia (Rayana:2020). Menurut Napitupulu dan Dwi Mahroji (2019), Indeks Pembangunan Manusia memuat tiga dimensi penting dalam pembangunan yaitu aspek pemenuhan kebutuhan akan hidup, panjang umur dan hidup sehat, serta untuk mendapatkan pengetahuan dan mampu memenuhi standar hidup layak. Melalui Indeks Pembangunan manusia terbentuklah sebuah proses yaitu proses memperbesar pilihan bagi orang-orang dan hal ini menjadi tujuan dari pembangunan itu sendiri. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dihitung melalui pengukuran

perbandingan dari Angka Harapan Hidup, Rata-Rata Lama Sekolah, serta Pengeluaran dan ini berlaku untuk semua negara seluruh dunia. Meskipun cukup luas indeks pembangunan manusia dianggap paling mendasar dan strategis dalam indikator yang dapat merefleksikan aspek-aspek peluang hidup panjang dan sehat, mempunyai kemampuan pengetahuan dan keterampilan yang memadai serta hidup layak artinya adanya kemudahan dalam memperoleh akses ekonomi (Puji dan Dhiah, 2011:4). Lebih rinci Sayifullah and Gandasari (2016) memperjelas, IPM ialah dimensi buat melihat akibat kemampuan pembangunan area yang mempunyai format yang amat besar, sebab menampilkan mutu masyarakat sesuatu wilayah dalam perihal harapan hidup, intelektualitas serta standar hidup layak. Pada penerapan pemograman pembangunan, IPM pula berperan membagikan arahan dalam memastikan prioritas formulasi kebijaksanaan serta determinasi program pembangunan. Perihal ini ialah arahan dalam membagikan perhitungan yang cocok dengan kebijaksanaan biasa yang sudah ditetapkan oleh kreator kebijaksanaan serta pemilik ketetapan.

Mengingat ekonomi merupakan salah satu variabel dari IPM maka pembangunan ekonomi yang meningkat akan meningkatkan IPM. Oleh karena itu, Pembangunan Ekonomi perlu dipacu pertumbuhannya. Definisi dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri adalah perkembangan ekonomi yang berlaku dari waktu ke waktu dan menyebabkan pendapatan daerah yang riil semakin berkembang. Pertumbuhan ekonomi sebagian besar yang diukur dari kenaikan besarnya pendapatan daerah pada periode tertentu. Tingkat pertumbuhan ekonomi menunjukkan persentase kenaikan pendapatan daerah riil pada suatu tahun tertentu dibandingkan dengan pendapatan daerah riil pada tahun sebelumnya. Pendapatan nasional sebagai nilai barang-barang dan jasa yang dihasilkan suatu Provinsi tersebut dihitung secara riil atau menurut harga tetap pada harga-harga di tahun tertentu yang berbeda dengan tahun dimana produksi nasionalnya dihitung. Pertumbuhan perekonomian diartikan sebagai kenaikan produk domestik regional bruto (PDRB) tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. Alat pengukuran pertumbuhan perekonomian dapat dilihat pada kenaikan produk domestik regional bruto. Perhitungan produk domestik regional bruto berbagai macam caranya, menurut BPS tahun 2009, menyebutkan bahwa pengertian produk domestik regional bruto dapat dilihat dari tiga sisi yaitu produksi, pendapatan dan pengeluaran.

Pertumbuhan ekonomi dapat menunjukkan sejauh mana aktivitas Perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu Periode tertentu. Tambunan (2014:40) menegaskan, dalam pemahaman ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi adalah penambahan PDB, yang berarti peningkatan PN (pendapatan nasional). Untuk meningkatkan PN, pertumbuhan ekonomiu (PDB) menjadi salah satu target penting yang harus dicapai dalam pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah Suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor Produksi yang dimiliki masyarakat. Indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Ada beberapa alasan yang mendasari pemilihan pertumbuhan ekonomi Menggunakan

Produk Domestik Bruto (PDB) bukan indikator lainnya di antaranya Adalah PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas produksi di dalam perekonomian, hal ini berarti peningkatan PDRB juga mencerminkan peningkatan balas jasa kepada faktor-faktor produksi tersebut. Dalam lingkup daerah, definisi pertumbuhan ekonomi daerah sama saja dengan pertumbuhan ekonomi secara nasional hanya saja lokasi atau wilayahnya dipersempit menjadi di wilayahnya masing-masing dan disesuaikan dengan Lingkungan operasionalnya, seperti provinsi, kota atau kabupaten. pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan ekonomi yang berlaku dari waktu ke waktu dan menyebabkan pendapatan nasional riil semakin berkembang (Sukirno 2012:29).

Bertambahnya penduduk di suatu daerah hendaknya membawa dampak positif dan dapat meningkatkan kesejahteraan di daerah tersebut, namun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan kesejahteraan juga harusnya ikut ditingkatkan. Faktor tersebut adalah kesehatan, pendidikan dan juga pemerataan ekonomi, bagi daerah yang berhasil meningkatkan faktor pendukung kesejahteraan akan dapat mencapai kesejahteraan bagi seluruh penduduk di daerah tersebut (Roychaida, 2016). Selanjutnya pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat ditunjukkan dengan melihat kenaikan PDRBnya, untuk itu guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi perlu dan harus diperhatikan aspek pembangunan manusia, termasuk juga dalam konteks pembangunan ekonomi di daerah, karena dengan modal manusia yang berkualitas, kinerja ekonomi diyakini juga akan lebih baik (Hasan, 2019).

Dengan demikian Indeks Pembangunan manusia mengimplikasikan bahwa orang harus mempengaruhi proses sehingga dapat membentuk kehidupan mereka yang lebih baik. Dalam hal ini Pembangunan manusia adalah suatu pengembangan masyarakat melalui pembangunan kemampuan manusia, oleh masyarakat melalui partisipasi aktif dalam proses yang membentuk kehidupan bermasyarakat, hal ini berarti secara langsung memperbaiki kehidupan mereka (Ridwan Maulana dan Prasetyo Adi, 2013). Hal ini bisa dikatakan bahwa pendekatan IPM lebih luas daripada pendekatan lain, seperti pendekatan sumber daya manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Hal ini dapat dilihat bahwa ketimpangan dalam pembangunan manusia dipengaruhi faktor tingkat pendidikan, layanan kesehatan, dan pengeluaran pemerintah yang bervariasi antar wilayah (Yuliani&Saragih, 2014).

Pandangan lain, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu ukuran untuk melihat dampak kinerja pembangunan wilayah, dalam hal harapan hidup, intelektualitas dan standar hidup yang layak (Jasasila, 2020). Demikian pula BPS Sumatera Utara pada tahun 2020 menyatakan bahwa ada beberapa manfaat IPM yaitu; IPM sebagai indikator keberhasilan upaya dalam pembangunan kualitas hidup manusia, Serta IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan dana alokasi umum (DAU), Dan IPM juga dapat digunakan untuk penentuan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah. Menyiasati IPM dengan 3 komponen diatas maka dapat diuraikan dalam bentuk:

1. Angka Harapan Hidup yaitu Angka rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. (BPS,2013). Angka harapan hidup di suatu wilayah setiap periodenya diharapkan akan selalu menunjukkan angka yang

meningkat secara signifikan. Tidak banyak yang tahu terkait pentingnya angka harapan hidup itu sendiri, terutama kalangan dengan pendidikan yang relative rendah. Pendidikan merupakan salah satu cara untuk menjamin dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia secara ekonomi dan sosial, serta sebagai salah satu cara mengatasi kesenjangan dalam upaya mencapai kesetaraan dan mewujudkan hidup makmur. Pendidikan dan kesehatan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan menjamin perbaikan yang terus berlangsung dalam tingkat teknologi yang digunakan oleh masyarakat. (Atmanti, 2005:30-39). Angka Harapan Hidup dalam hal ekonomi kesehatan juga sebagai penerapan bagi suatu teori, konsep dan teknik ilmu ekonomi dalam suatu sektor kesehatan, hal ini bisa dilihat bahwa dengan ekonomi kesehatan yang berkaitan erat terhadap hal-hal yang di alokasikan sumber daya di antara berbagai upaya dibidang kesehatan, hal ini terlihat bahwa jumlah sumber daya yang di gunakan dalam suatu pelayanan kesehatan, dikatakan memiliki berbagai pelayanan kesehatan, yang efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang memiliki dampak upaya pencegahan, pengobatan, dan pemulihan kesehatan dari orang-orang yang ada di sekitar.

2. Rata-Rata Lama Sekolah juga digunakan sebagai parameter untuk penghitungan aspek pendidikan. Rata-rata lama sekolah merupakan perhitungan jumlah tahun yang digunakan para penduduk dalam menjalani sebuah pendidikan formal. Hal ini dapat diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Penghitungan rata-rata lama sekolah mencakup para penduduk yang berusia 25 tahun ke atas. (BPS, 2019b; Noviatamara et al., 2019) Mengartikan sebagai penduduk yang memiliki tingkat kualitas yang layak dalam berbagai bidang ilmu. Yang dikatakan sebagai orang yang berkualitas dapat berupa (dokter, guru, wirausaha), maupun orang-orang lain yang memegang bidangnya dengan baik yang dapat mengembangkan bidangnya dan memiliki potensi untuk kemajuan ke depannya. Hal ini juga dapat kita lihat bahwa Berdasarkan Undang-Undang Republik Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan, pendidikan didefinisikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan sepirtual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan terdapat salah satu modal dasar bagi manusia yang harus dipenuhi dalam mencapai suatu pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Todaro,2006). Hal ini terlihat bahwa peningkatan kualitas SDM juga berupaya dalam pembangunan di bidang pendidikan. Hal ini masyarakat yang tamatan SLTA lebih besar dari pada tamatan Perguruan Tinggi. Hal ini dapat terlihat bahwa masih banyak masyarakat yang menyelesaikan SLTA yang tidak dapat melanjutkan kejenjang pendidikan di sebuah perguruan tinggi. Disini dapat terlihat bahwa belum ada maksimalnya dalam penyerapan bagi suatu angkatan kerja bagi masyarakat. Pendidikan juga dapat menjadikan suatu sumber daya manusia yang lebih cepat mengerti dan siap dalam menghadapi suatu perubahan dan pembangunan bagi negara.

3. Standar Hidup yang Layak atau Pengeluaran adalah hasil bagi antara pendapatan regional atas dasar harga konstan (ADHK) dengan adanya jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB perkapita dapat dilihat atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. (Jhingan 2007:46), Pengeluaran perkapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Pendapatan perkapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara pada satu tahun tertentu dengan jumlah penduduk negara pada tahun tersebut (Sukirno 2006:122). Sedangkan standart hidup yang layak ialah suatu ukuran kelayakan hidup penduduk dimana penduduk tersebut sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan. hal ini dapat dilihat bahwa pengeluaran per kapita per bulan dalam tingkat tententu. Dalam hal ini nilai pengeluaran yang kebutuhan miniumnya dalam makanan yang dapat disertakan dengan 2.100 kalori perkapita perhari. Dan juga terdapat paket komoditi kebutuhan dasar makanan yang diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur, dan susu, dll). Disisi lain Kebutuhan Non Makanan berupa kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Dalam hal ini terdapat upaya pembangunan manusia yang lagi dalam perkembangan, karena dapat dilihat bahwa peningkatan pendapatan perkapita tersebut juga merupakan suatu strategi pertumbuhan ekonomi. Dengan peningkatan pendapatan perkapita tersebut, diharapkan masalah-masalah pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan distribusi pendapatan dapat dihadapi dalam perkembangan wilayah yang dapat terpecahkan. Sejalan dengan berjalannya waktu, dapat kita sadari bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak dapat mengatasi masalah pengangguran, kemiskinan di suatu wilayah, dengan pendapatan yang menimpang. Hal ini dapat memperkuat suatu keyakinan bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan syarat yang diperlukan tetapi malah tidak mencukupi bagi proses pembangunan (Esmara, Meier dalam Kuncoro, 2010.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan melalui studi literatur dengan menganalisis data sekunder dengan cakupan spasial studi adalah Kabupaten Deli Serdang yang berada di Sumatera Utara. Dalam hal ini penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober - Desember 2021 berdasarkan data BPS tahun 2015 sampai 2020 tentang pendidikan, kesehatan dan ekonomi yang diperoleh dari web yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara. Namun karena berbagai keterbatasan, orientasi pembahasan terfokus kepada pembahasan ekonomi yaitu aspek ekonomi-pertumbuhan ekonomi (PDRB) dan Indeks Pembangunan Manusia.

Dalam implementasinya, ditemukan alasan dasar tentang perubahan metodologi penghitungan IPM, yaitu: **Pertama**, Beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik. PDB per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat

pada suatu wilayah. **Kedua**, penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam sebuah penghitungan IPM yang menggambarkan bahwa pencapaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh pencapaian yang tinggi dalam dimensi lain. Maka dalam hal ini terdapat metode perhitungan yang dapat dilihat bahwa Metode agregasi diubah dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik. Dengan menggunakan rata-rata geometrik dalam menyusun IPM dapat diartikan bahwa capaian suatu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain. Artinya, untuk mewujudkan suatu pembangunan manusia yang baik maka dalam ketiga dimensi juga harus memperoleh suatu perhatian yang sama besar dan sama pentingnya. IPM tinggi dapat menunjukkan kesejahteraan masyarakat yang tinggi. IPM juga dapat menggambarkan hasil dilakukan pembangunan manusia melalui tiga aspek yaitu Aspek Kesehatan yang diukur melalui Angka Harapan Hidup, Aspek Pendidikan diukur melalui Rata-Rata Lama sekolah serta aspek hidup layak yang diukur melalui pengeluaran per kapita. (Juliarini, BPS, 2019), Setiap komponen IPM tersebut dapat distandarisasi dengan nilai-nilai minimum dan maksimum dimana sebelum digunakannya dalam perhitungan IPM. Hal ini dapat digunakan seperti pada Rumus sebagai berikut:

1. Dimensi Kesehatan

$$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$$

2. Dimensi Pendidikan

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

$$I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

3. Dimensi Pengeluaran

$$I_{pengeluaran} = \frac{\ln(pengeluaran) - \ln(pengeluaran_{min})}{\ln(pengeluaran_{maks}) - \ln(pengeluaran_{min})}$$

Hal ini dapat dilihat bahwa IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dimana perhitungannya terdapat di Indeks Kesehatan, Pendidikan, dan Pengeluaran.

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$$

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Mengingat bahwa Sumatera Utara terdiri dari berbagai wilayah yaitu 33 Kabupaten/Kota yang berbeda kekuatan infra struktur pendidikan, fasilitas kesehatan dan besarnya PDRB maka untuk memperoleh hasil yang lebih berkualitas maka dalam hal ini penelitian lebih fokus menganalisis pertumbuhan ekonomi dan IPM di kabupaten Deli Serdang. Adapun perkembangan PDRB dan IPM kabupaten Deli Serdang dari tahun 2015-2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Pertumbuhan Ekonomi**

Kabupaten Kota	[Seri 2010]Pertumbuhan Ekonomi Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota (Persen)					
	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Sumatera Utara	-1.07	5.22	5.18	5.12	5.18	5.10
Nias	1.80	5.04	4.93	5.01	5.03	5.43
Mandailing Natal	-0.94	5.30	5.79	6.09	6.18	6.22
Tapanuli Selatan	0.39	5.23	5.19	5.21	5.12	5.02
Tapanuli Tengah	-0.76	5.18	5.20	5.24	5.12	5.08
Tapanuli Utara	1.50	4.62	4.35	4.15	4.12	4.81
Toba Samosir	-0.27	4.88	4.96	4.90	4.76	4.55
Labuhan Batu	0.09	5.07	5.06	5.00	5.06	5.04
Asahan	0.21	5.64	5.61	5.48	5.62	5.57
Simalungun	1.01	5.20	5.18	5.13	5.40	5.24
Dairi	-0.94	4.82	5.01	4.93	5.07	5.04
Karo	-0.80	4.60	4.55	5.21	5.17	5.01
Deli Serdang	-1.78	5.18	5.15	5.10	5.32	5.25
Langkat	-0.86	5.07	5.02	5.05	4.98	5.03
Nias Selatan	0.61	5.03	5.02	4.56	4.41	4.46
Humbang Hasundutan	-0.13	4.94	5.04	5.02	5.00	5.24
Pakpak Bharat	-0.18	5.87	5.85	5.94	5.97	5.93
Samosir	-0.59	5.70	5.58	5.35	5.27	5.77
Serdang Bedagai	-0.44	5.28	5.17	5.16	5.14	5.05
Batu Bara	-0.31	4.35	4.38	4.11	4.44	4.11
Padang Lawas Utara	1.14	5.61	5.58	5.54	5.96	5.94

Sumber: Badan Pusat Statistik 2020

Padang Lawas	1.18	5.64	5.96	5.71	6.06	5.74
Labuhanbatu Selatan	0.80	5.35	5.27	5.09	5.19	5.13
Labuanbatu Utara	0.27	5.15	5.20	5.11	5.21	5.18
Nias Utara	1.58	4.65	4.42	4.43	4.59	5.49
Nias Barat	1.66	4.82	4.77	4.81	4.83	4.87
Sibolga	-1.36	5.20	5.25	5.27	5.15	5.65
Tanjungbalai	-0.47	5.79	5.77	5.51	5.76	5.58
Pematangsiantar	-1.89	4.82	4.80	4.41	4.86	5.24
Tebing Tinggi	-0.70	5.15	5.17	5.14	5.11	4.86
Medan	-1.98	5.93	5.92	5.81	6.27	5.74
Binjai	-1.83	5.51	5.46	5.39	5.54	5.40
Padangsidempuan	-0.73	5.51	5.45	5.32	5.29	5.04
Gunungsitoli	0.38	6.05	6.03	6.01	6.03	5.39

Dari data tersebut dapat ditabulasi perkembangan pertumbuhan ekonomi kabupaten Deli Serdang sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Pertumbuhan Ekonomi Deli Serdang**

<b>Tahun</b>	<b>Pertumbuhan Ekonomi</b>	<b>Keterangan</b>
2015	5,25	Tumbuh
2016	5,32	Tumbuh
2017	5,10	Tumbuh
2018	5,15	Tumbuh
2019	5,18	Tumbuh
2020	-1,78	Negative
Jumlah	24,22	

Sumber: Badan Pusat Statistik 2020

Maka rata-rata pertumbuhan sekitar 4,03% dari uraian tersebut diketahui bahwa tahun 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami pertumbuhan negative. Pertumbuhan ini tentu akan berpengaruh kepada IPM Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya perlu pula kita engetahui inklusifitas pertumbuhan ekonomi ini didalam masyarakat Kabupaten Deli Serdang. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif adalah pertumbuhan ekonomi yang memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam berpartisipasi di bidang ekonomi. Dalam hal ini, masyarakat memiliki kemudahan untuk berusaha guna memperoleh penghasilan dan mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Adapun bidang-bidang usaha yang terbuka dari masyarakat dan berperan dalam pembentukan PDRB di Kabupaten Deli Serdang adalah:

**Tabel 3**  
**Bidang kehidupan dalam pembentukan PDRB**

<b>No</b>	<b>Lapangan Usaha Industri</b>
1.	Pertanian,kehutanan, dan perikanan
2.	Petambangan dan pengendalian
3.	Industri Pengolahan
4.	Pengadaan Listrik
5.	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
6.	Konstruksi
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
8.	Tranportasi dan Pengudangan
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
10.	Informasi dan Komunikasi
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi
12.	Real Estat
13.	Jasa Perusahaan
14.	Adminitrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial
15.	Jasa Pendidikan
16.	Jasa kesehatan dan Kegiatan Sosial
17.	Jasa lainnya

Sumber: Badan Pusat Statistik 2020

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa semua cabang usaha dan bisnis terbuka untuk masyarakat Deli Serdang .

### Menganalisis Perkembangan IPM Kab. Deli Serdang Menggunakan Data Time Series

Perkembangan Indeks Pembangunan Penduduk Dalam catatan Badan Pusat Statistik SUMUT diterangkan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 4**  
**IPM Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi SUMUT 2015-2020**

Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Nias	58,85	59,75	60,21	60,82	61,65	61,93
Mandailing Natal	63,99	64,55	65,13	65,83	66,52	66,79
Tapanuli Selatan	67,63	68,04	68,69	69,10	69,75	70,12
Tapanuli Tengah	67,06	67,27	67,96	68,27	68,86	69,23
Tapanuli Utara	71,32	71,96	72,38	72,91	73,33	73,47
Toba	73,40	73,61	73,87	74,48	74,92	75,16
Labuhanbatu	70,23	70,50	71,00	71,39	71,94	72,01
Asahan	68,40	68,71	69,10	69,49	69,92	70,29
Simalungun	71,24	71,48	71,83	72,42	72,98	73,25
Dairi	69,00	69,61	70,36	70,89	71,42	71,57
Karo	72,69	73,29	73,53	73,91	74,25	74,43
Deli Serdang	72,79	73,51	73,94	74,92	75,43	75,44
Langkat	68,53	69,13	69,82	70,27	70,76	71,00
Nias Selatan	58,74	59,14	59,85	60,75	61,59	61,89
HumbangHasundutan	66,03	66,56	67,30	67,96	68,83	68,87
Pakpak Bharat	65,53	65,81	66,25	66,63	67,47	67,59
Samosir	68,43	68,82	69,43	69,99	70,55	70,63
SerdangBedagai	68,01	68,77	69,16	69,69	70,21	70,24
Batu Bara	66,02	66,69	67,20	67,67	68,35	68,36
Padang Lawas Utara	67,35	68,05	68,34	68,77	69,29	69,85
Padang Lawas	65,99	66,23	66,82	67,59	68,16	68,25
Labuhan batu Selatan	69,67	70,28	70,48	70,98	71,39	71,40
Labuhan batu Utara	69,69	70,26	70,79	71,08	71,43	71,61
Nias Utara	59,88	60,23	60,57	61,08	61,98	62,36
Nias Barat	58,25	59,03	59,56	60,42	61,14	61,51
Sibolga	71,64	72,00	72,28	72,65	73,41	73,63
Tanjungbalai	66,74	67,09	67,41	68,00	68,51	68,65
Pemantangsiantar	76,34	76,90	77,54	77,88	78,57	78,75
Tebing Tinggi	72,81	73,58	73,90	74,50	75,08	75,17
Medan	78,87	79,34	79,98	80,65	80,97	80,98
Binjai	73,81	74,11	74,65	75,21	75,89	75,89
Padang sidimpuan	72,80	73,42	73,81	74,38	75,06	75,22
Gunungsitoli	66,41	66,85	67,68	68,33	69,30	69,31
<b>Sumatera Utara</b>	<b>69,51</b>	<b>70,00</b>	<b>70,57</b>	<b>71,18</b>	<b>71,74</b>	<b>71,77</b>

Sumber: BPS, Seri Publikasi Indeks Pembangunan Manusia.

Tumbuh dan berkembangnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sumatera Utara sangat ditentukan oleh IPM 33 Kabupaten/Kota yang berada di Sumatera Utara, oleh karena itu meningkatnya IPM Kabupaten/Kota akan meningkatkan pula IPM Sumatera Utara. Dari data IPM 33 Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Utara dapat digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan IPM Sumatera Utara dan untuk hal itu dalam pembahasan ini akan digunakan data time series IPM Kabupaten/Kota. Dari data yang ada diperoleh:

**Tabel 5**  
**Tabel IPM Deli Serdang**

No	Tahun	IPM	Keterangan
1.	2015	72,79	Tumbuh
2.	2016	73,51	Tumbuh
3.	2017	73,94	Tumbuh
4	2018	74,92	Tumbuh
5.	2019	75,43	Tumbuh
6.	2020	75,44	Tumbuh
Jumlah		446,03	

Sumber: Badan Pusat Statistik 2020

Dari tabel 5, diketahui bahwa rata-rata nilai IPM selama 6 tahun terakhir adalah  $446,03 : 6 = 74,33$ . Bila rata-rata ini digunakan sebagai standart penilaian maka terlihat bahwa IPM Kab.Deli Serdang terus tumbuh dari tahun ketahun bahkan 3 tahun terakhir pertumbuhannya diatas nilai rata-rata. Namun untuk mengetahui apakah IPM Kabupaten Deli Serdang memiliki nilai inklusif diseluruh kecamatan Deli Serdang perlu dilakukan amatan lebih jauh. IPM inklusif bermakna bahwa perkembangan IPM tersebut bermakna merata di tiga komponen yang membentuknya yaitu angka harapan hidup, rata rata lama sekolah dan tingkat pengeluaran masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari tabel 8.

Dari tabel 2 diketahui juga bahwa tahun 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami pertumbuhan yang negative namun IPM Kabupaten Deli Serdang tetap mengalami peningkatan. Hal ini dapat saja terjadi karena angka IPM tidak hanya dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dalam hal ini pengeluaran masyarakat(PDRB). Tetapi juga dipengaruhi oleh angka harapan hidup (kesehatan) dan lama masa belajar (pendidikan). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

**Tabel 6**  
**Umur Harapan Hidup**

Kabupaten Kota	Umur harapan Hidup Saat Lahir (Tahun)					
	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Sumatera Utara	69.10	68.95	68.61	68.37	68.33	68.29
Nias	69.75	69.68	69.43	69.18	69.07	68.97
Mandailing Natal	62.60	62.51	62.24	61.97	61.77	61.58
Tapanuli Selatan	64.91	64.82	64.55	64.28	64.01	63.74
Tapanuli Tengah	67.15	67.08	66.82	66.66	66.62	66.59
Tapanuli Utara	68.63	68.46	68.11	67.86	67.71	67.55
Toba Samosir	70.08	69.93	69.59	69.36	69.25	69.14
Labuhan Batu	69.93	69.86	69.60	69.44	69.40	69.36
Asahan	68.26	68.11	67.79	67.57	67.47	67.37
Sumalungun	71.22	71.07	70.75	70.53	70.43	70.34
Dairi	69.00	68.79	68.41	68.13	67.95	67.78
Karo	71.40	71.27	70.97	70.77	70.69	70.62
Deli Serdang	71.73	71.61	71.31	71.11	71.06	71.00
Langkat	68.80	68.59	68.22	67.94	67.79	67.63
Nias Selatan	68.74	68.58	68.24	68.00	67.83	67.66
Humbang Hasundutan	69.27	69.06	68.69	68.41	68.26	68.10
Pakpak Bharat	65.74	65.59	65.27	65.05	64.95	64.85
Samosir	71.27	71.16	70.87	70.68	70.47	70.26
Serdang Bedagai	68.68	68.46	68.08	67.79	67.63	67.47
Batu Bara	66.96	66.75	66.38	66.10	65.95	65.80
Padang Lawas Utara	67.17	67.06	66.77	66.58	66.54	66.50
Padang Lawas	67.09	66.98	66.69	66.50	66.40	66.31
Labuhanbatu Selatan	68.71	68.64	68.39	68.14	68.11	68.09
Labuanbatu Utara	69.46	69.37	69.09	68.91	68.80	68.70
Nias Utara	69.43	69.29	68.98	68.77	68.68	68.59
Nias Barat	68.96	68.82	68.50	68.28	68.10	67.94
Sibolga	69.01	68.77	68.36	68.05	67.87	67.70
Tanjungbalai	63.27	63.02	62.60	62.28	62.09	61.90
Pematangsiantar	73.55	73.33	72.93	72.63	72.46	72.29
Tebing Tinggi	70.87	70.76	70.47	70.28	70.21	70.14
Medan	73.14	72.98	72.64	72.40	72.34	72.28
Binjai	72.38	72.25	71.95	71.75	71.67	71.59
Padangsidempuan	69.41	69.15	68.73	68.41	68.37	68.32
Gunungsitoli	71.19	71.02	70.67	70.42	70.36	70.29

Sumber: Badan Pusat Statistik 2020

**Tabel 7**  
**Rata-Rata Lama Sekolah**

Kabupaten Kota	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)						
	2020	2019	2018	2017	2016	2015	
Sumatera Utara	9.54	9.45	9.34	9.25	9.12	9.03	
Nias	5.36	5.15	4.94	4.93	4.92	4.76	
Mandailing Natal	8.62	8.36	8.11	8.00	7.89	7.63	
Tapaneli Selatan	9.28	8.97	8.70	8.67	8.35	8.27	
Tapaneli Tengah	8.62	8.48	8.29	8.28	8.03	8.02	
Tapaneli Utara	9.85	9.71	9.65	9.46	9.32	9.31	
Toba Samosir	10.52	10.36	10.34	10.10	10.09	10.08	
Labuhan Batu	9.24	9.23	9.04	9.01	8.75	8.75	
Asahan	8.79	8.49	8.47	8.46	8.33	8.32	
Simahungun	9.60	9.36	9.18	8.95	8.86	8.80	
Dairi	9.58	9.34	9.15	8.90	8.70	8.69	
Karo	9.79	9.62	9.50	9.54	9.51	9.50	
Deli Serdang	10.09	10.08	9.92	9.70	9.68	9.48	
Langkat	8.65	8.64	8.52	8.51	8.18	7.92	
Nias Selatan	5.85	5.53	5.20	4.95	4.65	4.64	
Humbang Hasundutan	9.54	9.85	9.28	9.10	8.91	8.90	
Pakpak Bharat	9.03	8.73	8.48	8.47	8.46	8.45	
Samosir	9.45	9.15	9.14	8.95	8.94	8.64	
Serdang Bedagai	8.54	8.53	8.51	8.35	8.34	8.08	
Batu Bara	8.96	8.02	7.84	7.83	7.75	7.74	
Padang Lawas Utara	9.37	9.10	9.06	8.93	8.92	8.91	
Padang Lawas	9.81	8.69	8.67	8.43	8.41	8.40	
Labuhanbatu Selatan	8.75	8.74	8.71	8.70	8.69	8.68	
Labuanbatu Utara	8.40	8.36	8.35	8.34	8.33	8.31	
Nias Utara	6.58	6.25	6.09	6.08	6.07	6.06	
Nias Barat	6.49	6.14	6.00	5.78	5.77	5.74	
Sibolga	10.40	10.18	9.91	9.87	9.86	9.85	
Tanjungbalai	9.44	9.26	9.24	9.14	9.13	9.12	
Pematangsiantar	11.16	11.15	11.08	11.06	10.75	10.73	
Tebing Tinggi	10.31	10.28	10.24	10.09	10.07	10.06	
Medan	11.39	11.38	11.37	11.25	11.18	11.00	
Binjai	10.93	10.77	10.75	10.58	10.28	10.28	
Padangsidempuan	11.00	10.70	10.63	10.56	10.48	10.47	
Gunungsitoli	8.61	8.58	8.41	8.40	8.20	8.18	

Sumber: Badan Pusat Statistik 2020

Dari kedua data pada table 6 dan 7 dapat ditabulasi ke dalam tabel angka harapan hidup dan lama belajar Kabupaten Deli Serdang sebagai berikut:

**Tabel 8**  
**Gabungan Umur Harapan Hidup & Lama Belajar**

Tahun	Umur Harapan Hidup	Lama Belajar
2015	71,00	9,48
2016	71,06	9,68
2017	71,11	9,70
2018	71,31	9,92
2019	71,61	10,08
2020	71,73	10,09

Sumber : Badan Pusat Staitistik 2020.

Dari tabel 8 dapat diketahui bahwa, baik angka harapan hidup maupun angka lama belajar terus meningkat dari tahun 2015-2020. Hal inilah yang menyebabkan IPM Deli Serdang meningkat walaupun pertumbuhan ekonomi melemah atau negative.

## **KESIMPULAN**

Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan ekonomi yang berlaku dari waktu ke waktu dan menyebabkan pendapatan daerah yang riil semakin berkembang, Pertumbuhan ekonomi sebagian besar diukur dari kenaikan besarnya pendapatan daerah pada periode tertentu. Sedangkan IPM adalah indeks yang komposit mengukur suatu pembangunan manusia dalam tiga komponen dasar yaitu pendidikan, kesehatan dan pengeluaran. Hal ini terlihat bahwa dalam rumus IPM dan Pertumbuhan Ekonomi memiliki dua variabel bebas. Maka hal tersebut dapat terlihat bahwa IPM dan Pertumbuhan Ekonomi saling berhubungan, tetapi dapat dilihat bahwa pengaruhnya kecil karena terlihat pendidikan dan kesehatan tersebut mendominasi.

Jadi, Pertumbuhan Ekonomi Deli Serdang dari tahun 2015 hingga 2019 terus mencapai angka diatas 5% setahun hanya pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang sebesar -1,78. Demikian pula, Indeks Pembangunan Manusianya terus berkembang dari 72,79 ditahun 2015 menjadi 75,44 ditahun 2020. Perkembangan IPM ditahun 2020 tersebut meningkat walaupun pertumbuhan ekonomi mengalami pertumbuhan negative hal ini dapat terjadi karena kontribusi dari faktor pendidikan dan kesehatan.

## **SARAN**

Walaupun pertumbuhan ekonomi bukanlah satu-satunya yang menentukan penentu meningkatnya nilai IPM namun pertumbuhan ekonomi berperan penting dalam meningkatkan IPM karena pertumbuhan ekonomi adalah faktor utama yang dapat memberi akses terhadap meningkatnya kualitas bidang pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Deli Serdang idealnya harus terus dapat memacu meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerahnya (PDRB).

## **REFERENSI**

- Acemoglu, D., Laibson, D., & List, J. A. (2019). *Makroekonomi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Alhumami, A. (2016). *Evolusi Pemikiran Pembangunan* (pp. 1–5). pp. 1–5. Retrieved from <https://www.bappenas.go.id/files/3513/4986/4364/05amich2009101412582422510.pdf>
- Atmanti, Hastarini. 2005. *Investasi Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan*. *Dinamika Pembangunan* Vol 2 No 1.
- Barika (2015) 'Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah, Pengangguran Dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Se', *Jurnal Ekonomi dan Perencanaan Pembangunan*, 5(1), pp. 27–36.
- BPS. (2013). *Indeks Pembangunan Manusia 2013*. Medan: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara.
- BPS. (2019a). *Indeks Pembangunan Manusia 2018*. Jakarta: Badan Pusat Statistik. .

- BPS. (2020). Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2020. Medan: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara.
- Case, K. E., Fair, R. C., & Oster, S. M. (2017). *Macroeconomics Principles of* (Twelfth). Pearson.
- Cholili, F. M. and Hardjo, M. P. (2014) 'Analisis Pengaruh Pengangguran, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Jumlah Penduduk Miskin (Studi Kasus 33 Provinsi di Indonesia)', *Jurnal Ilmiah FEB Universitas Brawijaya*, 2(1).
- Hasan, N. A. (2019). Pengaruh PDRB, Kemiskinan dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2008-2014. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*.
- Ilhami, S. (2014). Analisis Pengaruh Anggaran Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di . Institut Pertanian Bogor.
- Jhinghan, ML.2007.Ekonomi Pembangunan. Teori dan Kebijakan.Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Juliarini, A. (2019). Kinerja Pendapatan Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Studi Kasus Provinsi Di Pulau Jawa.Simposium Nasional Keuangan Negara(1),934-97.
- Jasasila ,Pengaruh Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Terhadap IPM Kabupaten Batang Hari 2011-2019 Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, 2020 Vol. 11 No.1
- Kuncoro, Mudarajad, 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah, Erlangga, Jakarta.
- Latifah, N., Rotinsulu, D. C. and Tumilaar, R. L. . (2017) 'Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Dampaknya Pada Jumlah Penduduk Miskin Di Kota Manado', *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 17(2), pp. 106–117.
- Mahroji, Dwi dan lin Nurkhasanah. 2019. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Banten. *Jurnal Ilmu Ekonomi*
- Noviatamara, A., Ardina, T., & Amalia, N. (2019). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, (1), 53–6.
- Pratama, Y. C. (2014) 'Analisis Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia', *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 4(2), pp. 210–223. doi: 10.15408/ess.v4i1.1966.
- Puji, Lestari, dan Dhiah Fitriyati, 2011, Pengaruh Belanja Pemerintah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi,Jurnal Unesa (Tidak dipublikasikan), Surabaya: Universitas Negeri Semarang.
- Ramirez, A., G. Ranis, dan F. Stewart. 1998. Economic Growth and Human Capital. QEH Working Paper No. 18
- Ridwan Maulana,Prasetyo Adi. Pengaruh Pertumbuhan, Pendidikan Ekonomi dan Teknologi Terhadap IPM Provinsi di 2011-2017, *Journal of Economic sand Polic*,Vol 6 No. 3 2013
- Rochaida, E. (2016). Dampak Pertumbuhan Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Keluarga Sejahtera di Provinsi Kalimantan Timur. *Forum Ekonomi*, 18 (1), 2016, 14-24.

- Siregar, Dwi Rayana, Ahmad Albar Tanjung. 2020. Pengaruh Infrastruktur Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Langkat 2010-2019. E-Jurnal Matematika.
- Sukirno, Sadono (2012). Makroekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga. Jakarta: Rajawali. Pers.
- Tambunan, Tulus T.H. (2014). *Perekonoian Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Todaro, Michael. 2006. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Edisi Ketiga. Jakarta: Erlangga.
- Todaro, M. P., & Smith., S. C. (2015). *Economic Development (Twelfth Edition ed.)*. Pearson.